

**STRATEGI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM MANAJEMEN
PEMULIHAN PASCABENCANA BANJIR TERHADAP REHABILITASI
INFRASTRUKTUR SEKOLAH TERDAMPAK
DI KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Siti Fatimah Rahmila ¹, Siti Asiyah ², Ilham Ramadan Siregar ³
Muhammad Ali Yusuf ⁴, Anisah ⁵

¹²³⁴⁵Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

e-mail : sitirahmila37@gmail.com , Sitiasiyahdly2121@gmail.com ,
ilhamramadan@dtain-madina.ac.id , anisahlubis88@gmail.com ,
mhdyusuf0086as@gmail.com

ABSTRACT

The Mandailing Natal Regency Education and Culture Office's strategy for post-flood recovery management focuses on integrating rehabilitation schemes that are both responsive and preventive in nature for affected school infrastructure. This strategy is implemented through cross-sectoral coordination involving the Regional Disaster Management Agency (BPBD) and the Public Works Office to conduct accurate damage assessments as the basis for determining repair priorities. Mandailing Natal Regency is one of the areas in North Sumatra with a high level of vulnerability to flood disasters. These disasters not only impact the economic and social sectors but also damage educational infrastructure, hindering the teaching and learning process. This study aims to analyze the strategies implemented by the Mandailing Natal Regency Education and Culture Office in post-disaster recovery management, particularly regarding the rehabilitation of affected school infrastructure. The research method used is qualitative descriptive. Data collection was conducted through in-depth interviews with the Education Office, principals of affected schools, as well as field observations and documentation related to infrastructure damage reports. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

Keywords: Strategy, Department of Education, Recovery Management, Floods.

ABSTRAK

Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal dalam manajemen pemulihan pascabencana banjir berfokus pada pengintegrasian skema rehabilitasi yang bersifat responsif sekaligus preventif terhadap infrastruktur sekolah yang terdampak. Implementasi strategi ini dilakukan melalui koordinasi lintas sektoral yang melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan penilaian kerusakan (damage assessment) secara akurat sebagai dasar penentuan prioritas perbaikan. Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu wilayah di Sumatera Utara yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana banjir. Bencana ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi dan sosial, tetapi juga merusak infrastruktur pendidikan yang menghambat proses belajar mengajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal dalam manajemen pemulihan pascabencana, khususnya pada rehabilitasi infrastruktur sekolah yang terdampak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak Dinas Pendidikan, kepala sekolah terdampak, serta observasi lapangan dan dokumentasi terkait laporan kerusakan infrastruktur. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kata Kunci: Strategi, Dinas Pendidikan, Manajemen Pemulihan, Banjir.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, namun keberlangsungannya sering kali terancam oleh faktor eksternal seperti bencana alam. Indonesia, secara geografis, berada pada wilayah yang rawan bencana, di mana banjir menjadi fenomena tahunan yang paling sering merusak fasilitas publik. Menurut Pamungkas dkk. (2025) dalam bukunya Manajemen Bencana, pergeseran paradigma penanggulangan bencana

saat ini tidak lagi hanya fokus pada tanggap darurat, melainkan harus menyentuh aspek pemulihan jangka panjang yang terintegrasi, terutama pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan.

Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki indeks risiko bencana banjir yang sangat tinggi. Karakteristik topografi yang berbukit serta curah hujan yang ekstrem sering kali memicu banjir bandang yang merendam pemukiman dan

infrastruktur sekolah. Berdasarkan data lapangan hingga April 2026, tercatat ratusan siswa di beberapa desa di Mandailing Natal terpaksa menjalani ujian dan kegiatan belajar di lokasi darurat akibat gedung sekolah mereka rusak parah dan tertimbun material lumpur pascabanjir (Jawapos, 2026).

Kerusakan infrastruktur sekolah akibat banjir mencakup kerusakan fisik bangunan, hancurnya mobiler seperti meja dan kursi, hingga hilangnya dokumen administrasi serta buku pelajaran. Hal ini menciptakan hambatan serius dalam pencapaian target kurikulum dan menurunkan motivasi belajar siswa. UNESCO (2023) menegaskan bahwa keterlambatan dalam merehabilitasi fasilitas pendidikan pascabencana dapat menyebabkan hilangnya akses pendidikan bagi kelompok rentan, yang jika tidak ditangani dengan strategi manajemen yang tepat, akan berdampak pada penurunan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki peran sentral sebagai pemangku kebijakan utama dalam memastikan fungsi pelayanan pendidikan kembali normal setelah bencana terjadi. Strategi manajemen

pemulihan yang efektif menuntut adanya perencanaan yang matang, mulai dari tahap identifikasi kerusakan (damage assessment) hingga pelaksanaan rekonstruksi fisik. Namun, dalam praktiknya, proses rehabilitasi seringkali terbentur pada birokrasi yang kompleks dan keterbatasan alokasi anggaran daerah yang tidak sebanding dengan skala kerusakan yang terjadi di lapangan.

Manajemen pemulihan pascabencana yang ideal harus menerapkan prinsip build back better atau membangun kembali dengan lebih baik. Menurut Dewi (2024), keberhasilan pemulihan infrastruktur tidak hanya diukur dari kembalinya bentuk fisik bangunan, tetapi juga pada peningkatan ketahanan bangunan tersebut terhadap risiko bencana di masa depan. Di Kabupaten Mandailing Natal, strategi ini menjadi krusial mengingat banyak sekolah dibangun di zona rawan banjir, sehingga diperlukan kajian mendalam mengenai relokasi atau penguatan struktur bangunan sekolah agar lebih adaptif.

Selain aspek fisik, kolaborasi lintas sektoral menjadi kunci dalam strategi manajemen pemulihan. Dinas

Pendidikan tidak dapat bekerja sendiri; diperlukan koordinasi yang kuat dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pekerjaan Umum untuk sinkronisasi data dan anggaran. Kurangnya integrasi data antarlembaga seringkali menyebabkan distribusi bantuan rehabilitasi tidak merata, di mana sekolah di wilayah terpencil sering kali terlambat mendapatkan penanganan dibandingkan sekolah di pusat perkotaan.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemulihan yang disusun dengan realitas implementasi di lapangan. Kendala geografis dan aksesibilitas menuju wilayah terisolasi pascabanjir menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pendidikan dalam mendistribusikan material bangunan dan melakukan pengawasan proyek rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah analisis mendalam mengenai bagaimana strategi manajemen yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut guna mempercepat pemulihan layanan pendidikan.

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini difokuskan untuk membedah strategi manajemen pemulihan pascabencana yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal. Fokus utama penelitian adalah pada proses rehabilitasi infrastruktur sekolah yang terdampak banjir, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan manajemen bencana pendidikan yang lebih responsif, sistematis, dan berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan secara utuh dengan apa fenomena yang terjadi di lapangan. Prosedur penelitian yang digunakan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, ungkapan lisan dari narasumber, serta gambaran perilaku yang diamati secara mendalam. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif dengan menyeluruh mengenai realitas empiris yang terjadi tanpa

adenganya intervensi atau manipulasi dari peneliti (Sugiyono, 2018).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data skunder, Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian digunakan sebagai alat bantu untuk memastikan kegiatan penelitian berlangsung secara sistematis dan terstruktur. Setiap penulis pasti memerlukan analisis data dalam melakukan penelitian. Analisis data merupakan kegiatan yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Maka dari itu, analisis data dalam penelitian kualitatif ini penulis menggunakan Miles dan Huberman (Salim, 2006), Teknik Keabsahan data yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan Triangulasi Sumber, Triangulasi teknik dan triangulasi waktu, Penelitian di lakukan di Kabupaten Mandailing Natal.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal dalam menangani

pascabencana banjir dimulai dengan tahap identifikasi dan asesmen cepat terhadap kerusakan infrastruktur. Proses ini dilakukan melalui koordinasi dengan pihak sekolah untuk melaporkan kerusakan sarana prasarana melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan laporan fisik secara langsung. Akurasi data pada tahap ini menjadi krusial karena menentukan skala prioritas rehabilitasi, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah untuk mencakup seluruh sekolah yang terdampak di wilayah yang luas.

Manajemen pemulihan yang diterapkan mencakup aspek rehabilitasi fisik yang tidak hanya bertujuan mengembalikan fungsi bangunan, tetapi juga meningkatkan ketahanan bangunan terhadap bencana di masa depan. Dinas Pendidikan berupaya mengimplementasikan konsep pembangunan kembali yang lebih baik (build back better). Hal ini sejalan dengan strategi nasional di mana setiap perbaikan infrastruktur publik di daerah rawan bencana harus memperhatikan standar teknis yang lebih tinggi, seperti peninggian lantai bangunan atau penguatan

struktur fondasi agar tidak mudah tergerus arus banjir.

Dalam aspek pendanaan, strategi yang dilakukan adalah kolaborasi sumber anggaran antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Ketergantungan pada DAK masih sangat tinggi karena kapasitas fiskal daerah yang terbatas. Dinas Pendidikan berperan aktif dalam mengusulkan proposal rekonstruksi kepada Kementerian Pendidikan guna memastikan sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat dapat segera mendapatkan bantuan renovasi total yang tidak mungkin tertutupi hanya oleh dana darurat daerah.

Selain aspek fisik, strategi manajemen pemulihan juga menyentuh manajemen logistik dan pendistribusian bantuan sarana belajar. Banjir di Mandailing Natal seringkali menghancurkan buku perpustakaan, perangkat komputer, dan mebel sekolah. Dinas Pendidikan melakukan mobilisasi bantuan melalui kerja sama dengan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan donasi organisasi sosial untuk

mempercepat pengadaan alat peraga edukatif yang hilang, sehingga proses belajar mengajar dapat kembali normal tanpa harus menunggu siklus anggaran tahun depan.

Kendala utama dalam manajemen pemulihan di Kabupaten Mandailing Natal adalah letak geografis sekolah yang berada di wilayah terpencil dan rawan longsor susulan. Hal ini menghambat akses pengangkutan material bangunan ke lokasi sekolah yang terdampak. Strategi yang diambil dinas adalah dengan melibatkan masyarakat lokal secara partisipatif dalam proses rehabilitasi ringan. Dengan memberdayakan komunitas sekitar sekolah, proses perbaikan dapat berjalan lebih cepat dan memiliki rasa kepemilikan yang tinggi dari masyarakat terhadap keberlangsungan pendidikan di desa mereka.

Pembahasan mengenai efektivitas strategi ini menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga masih menjadi tantangan yang dinamis. Sinergi antara Dinas Pendidikan, BPBD, dan Dinas Sosial perlu diperkuat melalui protokol tetap (Protap) yang lebih jelas dalam pembagian wewenang masa transisi

darurat ke pemulihan. Tanpa adanya integrasi data yang kuat, seringkali terjadi tumpang tindih bantuan atau bahkan keterlambatan penanganan pada sekolah-sekolah di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau oleh tim pemantau.

Dari perspektif manajemen risiko, Dinas Pendidikan juga mulai mengintegrasikan strategi mitigasi dalam pemulihan dengan menggalakkan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Strategi ini memastikan bahwa setelah rehabilitasi fisik selesai, para guru dan siswa diberikan pelatihan kesiapsiagaan bencana. Rehabilitasi infrastruktur tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan kapasitas sumber daya manusia dalam merawat dan melindungi aset sekolah saat ancaman banjir tahunan kembali terjadi di wilayah Mandailing Natal.

Secara teoritis, strategi yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan telah memenuhi siklus manajemen bencana yang meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan. Namun, pada tahap pemulihan pascabencana banjir, penekanan lebih berat pada aspek fisik (rekonstruksi) dibandingkan aspek psikososial pendidikan.

Kedepannya, strategi manajemen pemulihan diharapkan dapat lebih seimbang antara perbaikan gedung sekolah dengan pemulihan trauma bagi warga sekolah agar kualitas pendidikan tidak menurun pasca trauma bencana.

Dinas Pendidikan juga memanfaatkan teknologi informasi sebagai bagian dari strategi monitoring pascabencana. Penggunaan aplikasi berbasis geospasial untuk memetakan sekolah-sekolah di zona merah banjir memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih berbasis data (*evidence-based policy*). Dengan pemetaan ini, kebijakan jangka panjang seperti relokasi sekolah yang berada di bantaran sungai dapat dipertimbangkan secara matang guna menghindari kerugian infrastruktur yang berulang setiap tahunnya.

Sebagai simpulan dari pembahasan, strategi manajemen pemulihan pascabencana di Kabupaten Mandailing Natal merupakan hasil perpaduan antara kebijakan top-down melalui penganggaran negara dan pendekatan bottom-up melalui kearifan lokal. Keberhasilan rehabilitasi infrastruktur sekolah

sangat bergantung pada kecepatan adaptasi birokrasi dalam merespons status darurat menjadi aksi nyata di lapangan. Penguatan pada sistem informasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama agar sekolah terdampak banjir dapat pulih lebih cepat dan lebih tangguh.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk pemulihan pascabencana banjir adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi dan Asesmen Cepat Kerusakan Infrastruktur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah awal yang diambil oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal adalah melakukan identifikasi kerusakan melalui tim unit reaksi cepat. Proses ini melibatkan pengumpulan data lapangan yang divalidasi dengan laporan dari kepala sekolah melalui sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Akurasi data pada tahap ini menjadi krusial karena menentukan klasifikasi kerusakan—ringan, sedang, atau berat—yang nantinya akan menentukan prioritas alokasi bantuan agar pemulihan tepat sasaran di tengah keterbatasan sumber daya.

2. Koordinasi Lintas Sektoral dan Pendanaan Rehabilitasi

Pembahasan mengenai strategi pendanaan mengungkap bahwa Dinas Pendidikan tidak bekerja sendiri, melainkan melakukan kolaborasi anggaran antara APBD daerah dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta dana hibah BNPB. Mengingat besarnya dampak banjir di Mandailing Natal, strategi pengusulan dana darurat ke pemerintah pusat menjadi jalur utama untuk melakukan rekonstruksi besar. Sinergi ini diperlukan untuk memastikan bahwa proyek rehabilitasi infrastruktur sekolah memiliki payung hukum yang kuat dan dukungan finansial yang mencukupi untuk jangka panjang.

3. Penerapan Konsep Build Back Better pada Infrastruktur

Strategi rehabilitasi fisik tidak hanya sekadar mengembalikan bangunan ke kondisi semula, tetapi menerapkan prinsip Build Back Better (membangun kembali dengan lebih baik). Dinas Pendidikan menekankan pada perubahan spesifikasi teknis, seperti peninggian elevasi lantai bangunan sekolah dan penggunaan material yang lebih tahan terhadap air. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan dampak jika terjadi

banjir berulang di masa depan, mengingat secara geografis beberapa sekolah di Mandailing Natal berada di daerah dataran rendah dan bantaran sungai.

4. Manajemen Logistik dan Distribusi Sarana Belajar

Selain bangunan fisik, strategi pemulihan mencakup manajemen logistik untuk mengganti sarana belajar yang rusak seperti mebel, buku, dan perangkat IT. Dinas Pendidikan melakukan mobilisasi bantuan melalui kemitraan dengan sektor swasta (CSR) dan organisasi kemanusiaan untuk mempercepat penyediaan alat tulis dan buku pelajaran. Langkah ini diambil agar aktivitas akademik dapat segera berjalan secara darurat di tenda atau ruang kelas sementara, tanpa harus menunggu selesainya konstruksi bangunan permanen yang memakan waktu berbulan-bulan.

5. Partisipasi Masyarakat dan Kearifan Lokal

Dalam proses rehabilitasi, ditemukan adanya strategi pelibatan masyarakat lokal (pembangunan partisipatif). Warga sekitar sekolah di Mandailing Natal seringkali dilibatkan dalam pembersihan sisa lumpur dan perbaikan ringan melalui gotong

royong. Strategi ini terbukti efektif dalam mempercepat pembersihan lingkungan sekolah pascabencana dan menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) yang tinggi terhadap fasilitas pendidikan yang ada di desa mereka.

6. Kendala Geografis dan Aksesibilitas Wilayah

Pembahasan mengenai kendala menunjukkan bahwa topografi Mandailing Natal yang berbukit dan sering terjadi longsor susulan menjadi hambatan utama dalam distribusi material bangunan. Strategi dinas untuk mengatasi hal ini adalah dengan menggunakan vendor lokal yang memiliki armada transportasi yang sesuai dengan medan berat. Keterlambatan sering terjadi pada sekolah-sekolah yang berada di wilayah terisolasi, sehingga diperlukan manajemen rantai pasok yang lebih adaptif dan fleksibel.

7. Integrasi Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)

Hasil penelitian juga menyoroti upaya Dinas Pendidikan dalam mengintegrasikan strategi mitigasi non-fisik melalui program SPAB. Strategi ini berfokus pada peningkatan kapasitas guru dan

siswa dalam menghadapi risiko banjir melalui simulasi evakuasi. Rehabilitasi fisik yang kuat harus dibarengi dengan kesiapsiagaan mental, sehingga saat banjir datang kembali, kerugian materiil maupun risiko korban jiwa dapat ditekan semaksimal mungkin.

8. Pemanfaatan Teknologi Pemetaan Risiko

Dinas Pendidikan mulai memanfaatkan teknologi informasi berbasis geospasial untuk memetakan sekolah-sekolah yang masuk dalam zona merah kerentanan banjir. Dengan data spasial ini, manajemen pemulihan menjadi lebih strategis, misalnya dengan memutuskan untuk merelokasi sekolah yang kerusakannya sudah mencapai 100% dan berada di titik paling berbahaya. Penggunaan teknologi ini membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy) untuk perencanaan pembangunan sekolah masa depan.

9. Pemulihan Psikososial dan Kualitas Pendidikan

Pembahasan berlanjut pada pentingnya pemulihan psikososial bagi warga sekolah. Dinas Pendidikan bekerja sama dengan

Dinas Kesehatan dan psikolog untuk memberikan pendampingan trauma healing bagi siswa. Strategi ini krusial karena infrastruktur yang megah tidak akan berguna jika suasana belajar-mengajar tidak kondusif akibat trauma psikis pascabencana. Oleh karena itu, rehabilitasi infrastruktur harus berjalan beriringan dengan rehabilitasi mental.

10. Evaluasi dan Monitoring Keberlanjutan

Terakhir, strategi pemulihan ditutup dengan tahap evaluasi dan monitoring keberlanjutan. Dinas Pendidikan melakukan pengawasan berkala terhadap bangunan yang telah direhabilitasi untuk memastikan kualitas konstruksi sesuai standar keamanan. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa keberhasilan manajemen pemulihan di Mandailing Natal sangat ditentukan oleh kecepatan koordinasi birokrasi, transparansi anggaran, serta komitmen jangka panjang dalam memelihara infrastruktur yang telah diperbaiki.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis simpulkan bahwa Keberhasilan rehabilitasi

infrastruktur sekolah sangat bergantung pada kecepatan asesmen data, kolaborasi pendanaan lintas sektoral, serta penerapan prinsip build back better untuk menciptakan bangunan yang lebih resilien. Integrasi antara perbaikan fisik yang tahan bencana dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) menjadi kunci utama dalam memastikan keberlanjutan proses belajar-mengajar. Dengan demikian, pemulihan tidak hanya berfokus pada pengembalian fungsi sarana prasarana, tetapi juga pada mitigasi jangka panjang melalui pemanfaatan teknologi pemetaan risiko dan pelibatan aktif masyarakat lokal guna mewujudkan ekosistem pendidikan yang lebih tangguh terhadap ancaman banjir di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- BNPB. (2023). Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Infrastruktur Publik. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- BNPB. (2024). Laporan Tahunan Penanggulangan Bencana: Evaluasi Infrastruktur Publik di Daerah Rawan. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Dewi, A. (2024). Manajemen Pasca Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Jawapos. (2026). Akibat Banjir, 135 Siswa SD dan 55 Siswa SMP di Mandailing Natal Ujian Darurat. Diakses dari metrodaily.jawapos.com.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Panduan Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Pasca-Pandemi dan Bencana Alam. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). Laporan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Wilayah Rawan Banjir. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Mardiana, S., & Siregar, A. H. (2023). Manajemen Strategis Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana di Sumatera Utara. Medan: Pustaka Bangsa.
- Nasution, H., & Siregar, M. (2023). Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal dan Rawan

- Bencana di Sumatera Utara.
Medan: Pustaka Ilmu.
- Nasution, M. I. (2024). "Evaluasi Kebijakan Rehabilitasi Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal". *Jurnal Administrasi Publik dan Manajemen Bencana*, 12(2), 145-160.
- Pamungkas, T. D., & Suprapti. (2025). *Manajemen Bencana: Perspektif dan Paradigma Baru*. Jakarta: Lingkar Edukasi Indonesia.
- Prasetyo, dkk. (2024). *Strategi Pemulihan Infrastruktur Publik Pascabencana di Wilayah Sumatera*. Media Sains Indonesia.
- Sari, D. P. (2024). "Analisis Manajemen Rehabilitasi Sekolah Pasca Banjir di Wilayah Pantai Barat Sumatera". *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*, 15(1), 45-62.
- Sari, R. P., et al. (2023). *Build Back Better: Strategi Pemulihan Infrastruktur Pendidikan Pascabencana*. Yogyakarta: Deepublish.
- UNESCO. (2023). *Education in Emergencies and Protracted Crisis: Recovery Strategies*. Global Education Monitoring Report.
- Zulkifli, R. (2023). *Membangun Resiliensi: Manajemen*
- Bencana di Sektor Pendidikan.
Jakarta: RajaGrafindo Persada.